



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN

**KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BABI	PENDAHULUAN
A	Visi dan Misi Kabupaten Cirebon
B	Tujuan dan Sasaran
C	Strategi dan Kebijakan
D	Program dan Kegiatan
BABII	GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....
A	VISI MISI KABUPATEN CIREBON
B	TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI.....
BABIII	PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024
BAB IV	PENUTUP
	LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/ Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketenteraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat, dan untuk Kabupaten Cirebon telah dikeluarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian

Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat yang terdiri dari bidang urusan dan rincian urusan.

Melalui urusan tersebut, Kecamatan Plered berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Cirebon kepada Camat agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Plered adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya Visi Kabupaten Cirebon;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima, Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan (SP) yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,

menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. Sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis memiliki potensi wisata dan potensi ekonomi produktif rumah tangga berbasis industri meubelair, industri batik dan kerajinan rotan yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Plered harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Plered adalah merupakan salah satu kecamatan dari 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Kecamatan Plered adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Weru. Wilayah ini mempunyai posisi sangat strategis sebagai bagian dari jalur tengah lintasan antara Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon.

a. Kondisi Geografis

Kecamatan Plered terletak diantara $06^{\circ}39'26.42''$ sampai dengan $06^{\circ}42'39.99''$ Lintang Selatan (LS) dan diantara $108^{\circ}29'23.07''$ sampai dengan $108^{\circ}32'37.97''$ Bujur Timur (BT) yang terbentang dari utara hingga selatan dan memiliki luas wilayah 11.40134Km^2 , yang terdiri dari pekarangan seluas 8.84844Km^2 dan persawahan seluas 2.55290Km^2 . Jarak terjauh dari arah Barat ke Timur sepanjang 5Km dan Utara ke Selatan sepanjang 9Km. Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten sejauh 9,5Km.

Batas administrasi wilayah Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Gunung Jati dan Kecamatan Suranenggala
- Sebelah Selatan : Kecamatan Weru
- Sebelah Barat : Kecamatan Plumbon dan Kecamatan Jamblang
- Sebelah Timur : Kecamatan Tengah Tani

b. Kondisi Topografi

Permukaan tanah di Kecamatan Plered merupakan daerah datar (Hampanan), dengan tingkat kemiringan lahan kurang dari 15° , serta memiliki ketinggian antara 6-7 meter diatas permukaan air laut.

c. Kondisi Klimatologi

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson, iklim di Kecamatan Plered termasuk tipe B/C ($Q=56,06\%$). Tipe ini memiliki rata-rata bulan kering 3,7 dan rata-rata bulan basah 6,6. Tipe ini termasuk golongan daerah beriklim sedang-hujan dengan curah hujan rata-rata 1.500-4.000mm per tahun.

Suhu tertinggi mencapai 33⁰C dan suhu terendah sekitar 24⁰C dengan suhu rata-rata 28⁰C. Kisaran suhu sebesar itu dikategorikan sebagai daerah tropis. Wilayah Plered juga dipengaruhi oleh Angin Kumbang yang bersifat kering.

d. Keadaan Hidrologi

Sumber-sumber air yang ada di Kabupaten Cirebon berasal dari air permukaan dan air bawah tanah. Sumber air permukaan berasal dari beberapa sungai kecil seperti : Sungai Soka, Sungai Silayur dan Sungai Cipager yang bermuara di Sungai Bondet, Sungai Condong dan Sungai Pekik.

e. Kondisi Administrasi Pemerintahan

Kecamatan Plered meliputi 10 Desa, 25 Dusun, 47 RW dan 172 RT. Dalam hal ini masih cukup banyak Desa-Desa yang secara administratif terdapat beberapa Dusun, namun pada kenyataannya hanya sebutannya saja, sehingga wilayah kerjanya adalah RW.

f. Kondisi Demografi

Kecamatan Plered adalah salah satu di antara kecamatan-kecamatan di Kabupaten Cirebon yang mempunyai jumlah penduduk cukup besar. Penduduk Kecamatan Plered pada Tahun 2021 adalah sebanyak 55.303 jiwa, yang terdiri dari 28.059 Laki-Laki dan 27.244 Perempuan, dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 4.495 jiwa per Km².

Dari total penduduk sebagian besar diantaranya adalah laki-laki sehingga sex rasionya adalah 102,99. Penyebaran penduduk Kecamatan Plered per Desa hingga pada tahun 2021 masih menunjukkan kondisi kurang merata seperti tahun-tahun sebelumnya. Penduduk terbesar terdapat di Desa Tegalsari yaitu sebanyak 8.941 jiwa dengan sebaran/distribusi penduduknya sebesar 16,00% dan yang terkecil adalah Desa Trusmi Wetan dengan jumlah penduduk hanya 2.766 jiwa (sebaran penduduk sebesar 5,00%).

Kepadatan penduduk di masing-masing Desa juga menunjukkan ketidakmerataan. Hal ini disebabkan kondisi dan potensi masing-masing wilayah

Desa Perkotaan, dimana banyak terdapat kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat di berbagai bidang usaha yang dapat memberikan lapangan pekerjaan seperti perdagangan, industri, pengangkutan, pertanian, pertambangan, pemerintahan, jasa-jasa dan lain-lain.

g. Kondisi Ekonomi

Dalam perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah dan untuk mengetahui sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut, diperlukan bermacam-macam data statistik yang dapat dijadikan bahan evaluasi pembangunan ekonomi yang telah dicapai dan perencanaannya di masa yang akan datang.

Pada dasarnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pemerataan pembagian pendapatan, meningkatkan hubungan ekonomi antar wilayah/desa dan mengupayakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi yang semula dari sektor primer, yaitu sektor yang bergantung pada jenis lapangan usaha pertanian, kepada sektor sekunder (lapangan usaha industri pengolahan, listrik gas dan air minum, konstruksi/bangunan) serta sektor tersier (lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran, angkutan dan komunikasi, bank/lembaga keuangan, perusahaan persewaan, jasa pemerintahan dan jasa swasta).

Salah satu data statistik yang sangat diperlukan untuk evaluasi dan perencanaan ekonomi makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang disajikan secara series.

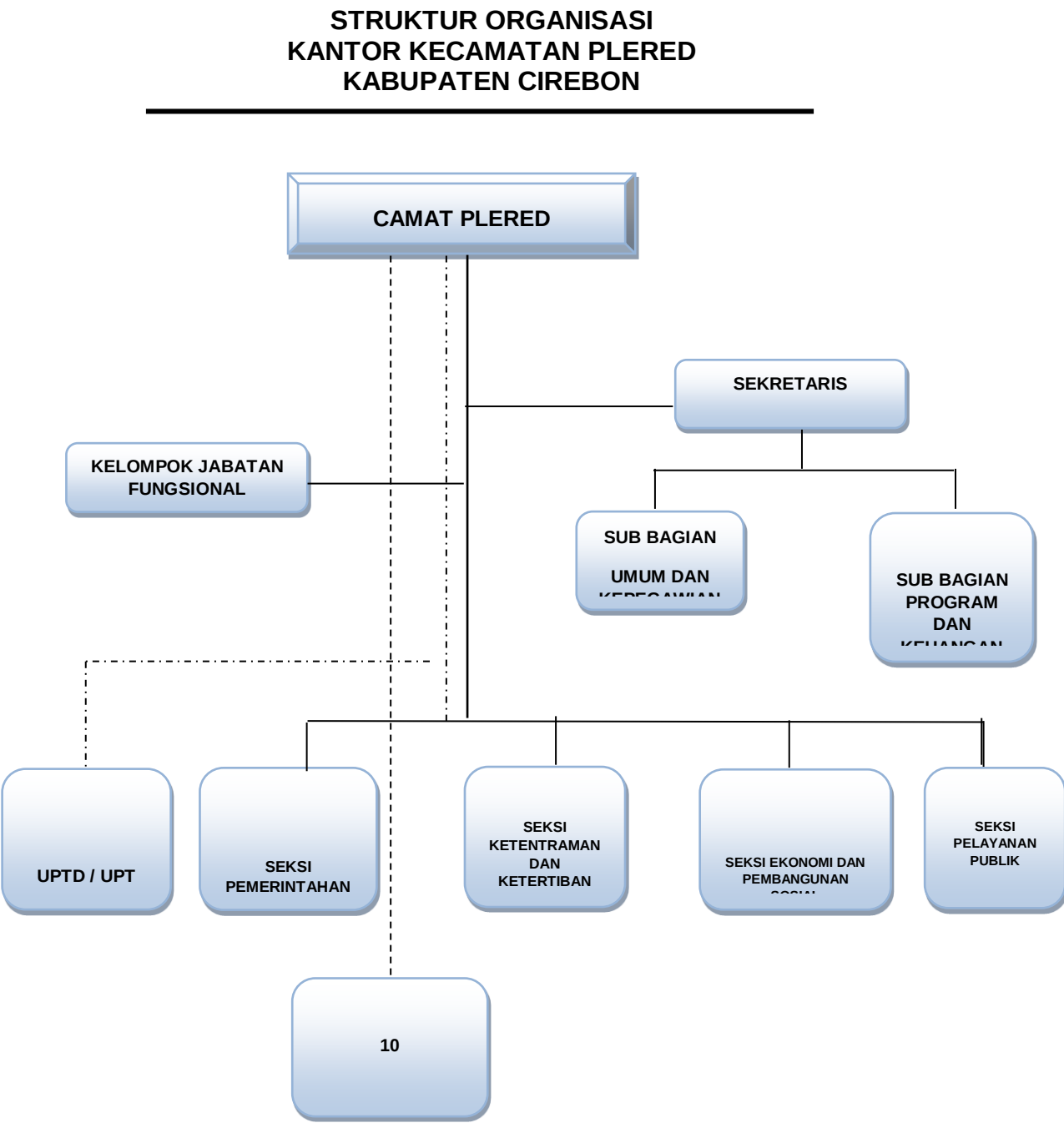
Angka-angka yang disajikan secara sektoral memperlihatkan tentang struktur perekonomian suatu daerah, apakah menunjukkan ke arah daerah yang agraris atau industri. Berdasarkan data dari masing-masing sektor dapat dilihat peranan dan sumbangan tiap sektor terhadap jumlah pendapatan secara keseluruhan.

Dengan adanya gambaran perekonomian suatu daerah, merupakan bahan bagi para perencana ekonomi, baik di kalangan pemerintah maupun swasta, untuk menentukan ke arah mana daerah tersebut akan dikembangkan.

h. Kondisi Pendidikan

Penyebaran Sekolah Dasar di Kecamatan Plered sudah cukup merata dan proporsional dengan jumlah penduduk secara umum.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon, maka Struktur Organisasi Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:



DAFTAR SUSUNAN PEGAWAI KECAMATAN PLERED

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
1.	DINDIN WAHYUDIN RIDWAN, S.Sos NIP. 19700207 199006 1 001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Camat
2.	SARTONO, -, SKM., M.P.H NIP. 19720926 199402 1 001	Pembina, IV/a	Sekretaris Camat
3.	YANDI BUDI RISWANDI, S.Sos NIP. 19680728 199702 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Pemerintahan
4.	ROSA ADI SUSILO, S.Sos. NIP. 19750103 200901 1 002	Penata (III/c)	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5.	YETI ERNAWATININGSIH, SE NIP. 19700724 199903 2 004	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Pendapatan dan Pelayanan Umum
6.	ANINDA PUJI PUTRANTI, SAB. NIP. 19850216 200902 2 001	Penata (III/c)	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Sosial
7.	A. TOHARI, S.Sos.I, M.SiNIP. 19781007 200901 1 005	Penata (III/c)	Ka Subag Umum dan Kepegawaian
8.	KUSTANDI, SE NIP. 19750424 200901 1 003	Penata (III/c)	Ka Subag Program dan Keuangan
9.	SAHDIYANTO NIP. 19800513 200801 1 005	Penata Muda (III/a)	Pelaksana
10.	H. MOHAMMAD MUSLIMIN NIP. 19671024 200701 1 021	Penata Muda (III/a)	Pelaksana/Bendahara
11.	MISKAD MASDUKI NIP. 19670317 200701 1 018	Penata Muda (III/a)	Pelaksana
12.	EDI SANJAYA NIP. 19791212 200801 1 006	Penata Muda (III/a)	Pelaksana
13.	RAPI NIP. 19720304 200701 1 029	Penata Muda (III/a)	Pelaksana
14.	PUJI HASTUTI NIP. 19690611 200701 2 013	Penata Muda (III/a)	Pelaksana

A. Visi dan Misi Kabupaten Cirebon

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Selanjutnya perumusan dan penetapan Mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon bahwa Kecamatan Plered sebagai Kecamatan yang harus mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan cepat, tepat dan benar serta efektif dan efisien dengan melayani masyarakat atau pihak lain dengan efektif dan efisien baik waktu maupun peraturan yang berlaku, sehingga agenda utama yang harus dilakukan adalah penataan internal organisasi dalam kerangka mempersiapkan segala sumber daya yang ada untuk optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Pencapaian terhadap visi tersebut juga diyakini akan menjadi kunci sukses bagi berbagai penyelenggaraan program pemerintah dimasa yang akan datang.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon, agar lebih terarah dan berhasi guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama – sama masyarakat Kabupaten Cirebon telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 disusun visi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”

Visi ini menggambarkan keinginan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menjadikan wilayah Kabupaten Cirebon dalam kondisi sejahtera dan memiliki daya saing pada 5 (lima) elemen kehidupan Kabupaten Cirebon yaitu Cirebon Berbudaya, Cirebon Sejahtera, Cirebon Agamis, Cirebon Maju dan Cirebon Aman. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yaitu :

1. Berbudaya : Berbudaya mengandung pengertian mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Berbudaya kerap juga diartikan sebagai beradab. Berbudaya dalam konteks ini lebih pada penghargaan atas nilai-nilai yang mengandung keluhuran dan kebaikan yang menjadi tradisi lokal, baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, tutur hingga simbol-simbol atas nilai tersebut;
2. Sejahtera : Sejahtera dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat merasa aman karena terpenuhinya kebutuhan dasar, baik aman secara ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan sosial;
3. Agamis : Agamis dimaksudkan bahwa agama menjadi landasan nilai dasar masyarakat dalam berperilaku, baik secara individual maupun sosial. Nilai agama yang mengajarkan kebaikan diharapkan mampu menjadi ruh dalam sikap individu, sehingga tercipta suasana yang aman, harmonis dan produktif;
4. Maju : Maju mempunyai makna menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang maju dan meningkat dari kondisi masa lalu. Maju juga berarti pembangunan daerah harus dapat menciptakan peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar serta tersedianya sarana dan

prasarana dasar yang memadai, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dan peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, semakin baiknya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah guna mendorong peningkatan perekonomian, peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Cirebon agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja yang semakin kompetitif dan siap berperan dalam menghadapi perubahan sistem global. Maju juga dimaksudkan sebagai kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat orang banyak;

Aman : Aman dimaksudkan sebagai kondisi di mana tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram, sehingga diharapkan masyarakat dapat melaksanakan kehidupan dengan tenang dan damai, yang menjamin terselenggaranya pembangunan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024, maka ditetapkan misi Kabupaten Cirebon yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Menjunjung Tinggi Dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya, Tradisi Dan Adat Istiadat, Misi ini dimaksud untuk Melestarikan dan menumbuhkembangkan budaya masyarakat.
2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Pelatihan, Kesehatan Dan Ekonomi, Misi ini dimaksud untuk Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera.
3. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Senantiasa Menerapkan Nilai Agama, Budi Pekerti, Santun, Dan Beretika, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan Kesalehan sosial dan kerukunan antar dan inter umat beragama.
4. Meningkatnya Produktivitas Masyarakat Untuk Lebih Maju Dan Unggul Sehingga Menambah Daya Saing Di Pasar Internasional, Nasional Dan Regional, Yang Didukung Oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan smart serta penguatan otonomi desa.

5. Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Umum Untuk Mewujudkan Kondusivitas Daerah Guna Mendukung Terciptanya Stabilitas Nasional, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

B. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, juga merupakan operasionalisasi dari misi. Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga fokus organisasi dapat lebih diarah kepada sasaran yang akan dicapai.

Berdasarkan beberapa misi sebagaimana telah dijelaskan di atas maka sebagai langkah selanjutnya Kecamatan Plered telah menjabarkan lagi misi tersebut menjadi beberapa Indikator. Melalui penjabaran indikator tersebut dapat menunjukkan apa yang akan dicapai misi Kecamatan Plered seperti yang tertuang dalam Renstra untuk program 5 (lima) tahun kedepan. Dari Misi dan Tujuan agar dapat lebih menggambarkan sesuatu yang akan dicapai lebih nyata maka juga telah ditentukan sasaran sebagai yang tercantum dalam lampiran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Plered Tahun 2019 – 2024, adapun tujuan dari misi di atas adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”.

b. SASARAN

Sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan;
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat.

C. Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Cara mencapai tujuan dan sasaran agar mencapai hasil yang konsisten dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka perlu disusun suatu strategi organisasi yang menjalankan pemikiran-pemikiran secara Konseptual, analitis, realistis, rasional dan

komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi untuk mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan berbagai kondisi lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Strategi juga mencakup masalah pembiayaan, baik berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka diperlukan beberapa langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu Kecamatan Plered memiliki strategi dasar dalam pencapaian tujuan dan sasarnya itu pada setiap tindakan (*action*) dan alokasi sumber daya serta sumber dana organisasi dilaksanakan sepenuhnya untuk mencapai kinerja yang diinginkan, antara lain penentuan kebijaksanaan, program dan kegiatan. Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Plered adalah :

1. Optimalisasi manajemen pelayanan public tingkat Kecamatan;
2. Integrasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
3. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.

a. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk serta cara bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk serta cara bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. Maka Pemerintah Kecamatan Plered menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyederhanaan mekanisme dan standar pelayanan;
2. Peningkatan Akuntabilitas perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan secara professional dan inovatif;
3. Mewujudkan tata Pemerintahan Desa yang baik (good government).

D. Program dan kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
- 3) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
- 7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 9) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 3) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- 3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

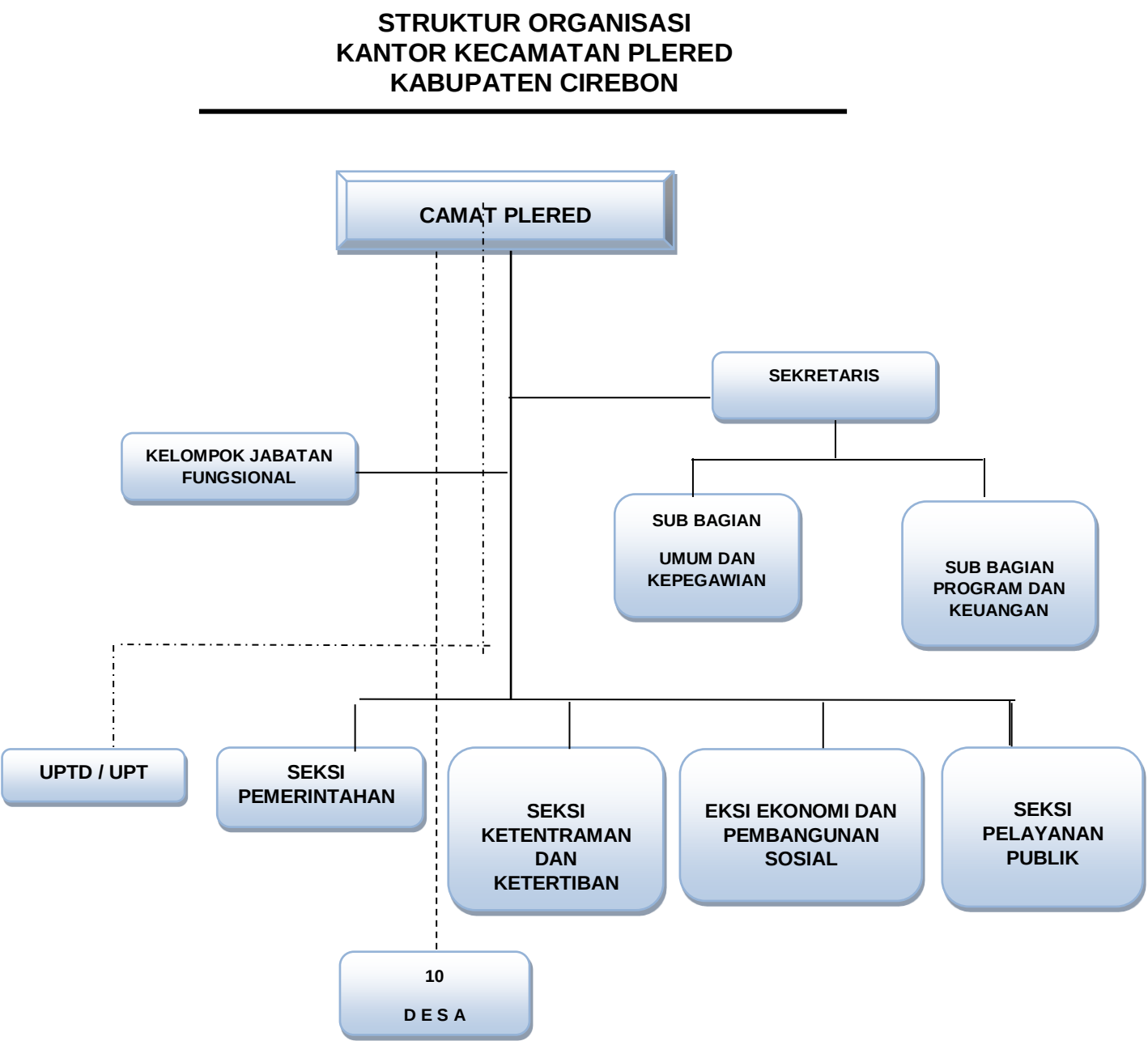
- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral

5. Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat

- 1) Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial

- 3) Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa
- 4) Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum
- 5) Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon, maka Struktur Organisasi Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:



DAFTAR SUSUNAN PEGAWAI KECAMATAN PLERED

INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PLERED

Analisa efektivitas adalah keterkaitan pencapaian kinerja yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pada tahun 2023 telah dilakukan 15 kegiatan dari 6 program, dari hasil perhitungan efektivitas menunjukkan bahwa semua outcome kegiatan tersebut telah efektif yang berarti semua output yang dihasilkan telah dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

a. Target dan realisasi kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

No	Program	Satuan	Target	Realisasi	Pencapaian Target	Ket.
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100	94.12	100	Tercapai
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100	99.85	100	Tercapai
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100	99.89	100	Tercapai
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100	-	100	Tercapai
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100	100.00	100	Tercapai
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100	99.74	100	Tercapai

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dan 2023

No	Program	2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	90.19	100	99.74
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	100.00	100	99.85
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	98.29	100	99.89

4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	-	100	-
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	-	100	100
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	97.55	100	91.27

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan 2023 dengan target jangka menengah yang ada dalam Renstra.

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2023 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2023)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2023 (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	96.34	96.34
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	13.33
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	33.33
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	100

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9	69.23
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	20
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	100
Penyediaan Bahan/Material	35	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	3.64
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13	27.08
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0
Pengadaan Mebel	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	100
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	20
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7	70
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0
Pemeliharaan Mebel	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	100
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	100
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	100
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	33.33
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3	100
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0	0
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	41.67
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3	100
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	0	0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	0	0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	100
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3	100
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	0
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9	75
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	100

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	100
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	3	75
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12	100
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0	0
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	0
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0	0
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	100
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18	100
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0	0
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	0	0
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	0
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0	0
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	0	0
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	0	0

Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	0	0
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0	0
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	10
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0	0
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0	0

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

- 1) Permasalahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:
 - a) Kegiatan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan tidak ada masalah.
 - b) Kegiatan Jasa Perbaikan peralatan kerja, terdapat permasalahan sebagai berikut : kadang Separpart susah sehingga perbaikan cukup lama.
 - c) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor terdapat permasalahan yaitu kurangnya anggaran pada ATK di Kantor Kecamatan Plered.
 - d) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan terdapat permasalahan yaitu kurangnya anggaran pada Cetak di Kantor Kecamatan Plered.
 - e) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan tidak ada masalah.
 - f) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman tidak ada masalah.
 - g) Kegiatan rapat dan konsultasi keluar daerah tidak ada masalah.
- 2) Solusi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan Jasa Sumber Daya Listrik, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : penambahan daya listrik.
 - b) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan adalah Mengusulkan dan menambahkan anggaran pada kegiatan diatas untuk pemenuhan kebutuhan operasional kantor yang sesuai kebutuhan.
 - c) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Jasa Perbaikan peralatan kerja perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : mencari cadangan sparpert yang menyediakan komponen tersebut.

- d) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan peralatan dan perlengkapan kantor perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Mengusulkan anggaran peralatan dan perlengkapan kantor yang lebih besar dan sesuai kebutuhan.
- 3) Permasalahan Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur :
- a) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terdapat permasalahan yaitu kurangnya anggaran pada kebutuhan bahan peralatan kebersihan dan bahn pembersih untuk kantor Kecamatan Plered.
 - b) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional tidak ada masalah.
 - c) Kegiatan Rehabiltasi Sedang/Berat Gedung Kantor terdapat masalah yaitu : sandaran bangunan yang sudah retak, tempat parkir sudah mau ambruk dan bangunan ruangan sekretariat yang kurang luas.
- 4) Solusi Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur :
- a) Untuk Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah Mengusulkan dan menambahkan anggaran pada kegiatan diatas untuk pemenuhan kebutuhan operasional kantor yang sesuai kebutuhan.
 - b) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan Jasa Rehabiltasi Sedang/Berat Gedung Kantor, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Mengusulkan anggaran Rehabiltasi Sedang/Berat Gedung Kantor yang lebih besar dan sesuai kebutuhan.
- 5) Permasalahan Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- a) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya tidak ada masalah
- 6) Permasalahan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- b) Kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tidak ada masalah
 - c) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran tidak ada masalah
 - d) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun tidak ada masalah
- 7) Permasalahan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral.
- a) Kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral tidak ada masalah
- 8) Permasalahan Program Peningkatan Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah kepada Camat
- a.) Kegiatan pengendalian sebagian kewenangan pemerintah kepada Camat bidang Ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak ada masalah

- b.) Kegiatan pengendalian sebagian kewenangan pemerintah kepada Camat bidang Kesejahteraan Sosial tidak ada masalah
- c.) Kegiatan pengendalian sebagian kewenangan pemerintah kepada Camat bidang Keamanan ketertiban perlindungan masyarakat dan pembinaan kesatuan bangsa tidak ada masalah
- d.) Kegiatan pengendalian sebagian kewenangan pemerintah kepada Camat bidang Pelayanan Umum tidak ada masalah
- e.) Kegiatan pengendalian sebagian kewenangan pemerintah kepada Camat bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa tidak ada masalah.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Analisa efisiensi adalah efisiensi penggunaan input untuk mendapatkan output berdasarkan hasil analisa terhadap pencapaian program/kegiatan tahun 2023 yang telah dilakukan dengan 23 kegiatan. Kegiatan tersebut seluruhnya didukung oleh sumber daya dari seluruh dana kegiatan. Berdasarkan penghitungan analisis efisiensi menunjukkan semua kegiatan tersebut telah dilakukan sesuai antara rencana dan realisasi input dan output.

Analisis efektivitas adalah keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pada Tahun 2019 telah dilakukan 23 (dua puluh tiga) Kegiatan, dari hasil perhitungan efektivitas menunjukkan bahwa semua outcome kegiatan tersebut telah efektif yang berarti semua output yang dihasilkan telah dimanfaatkan sesuai dengan fungsi yang diharapkan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja di Kecamatan Plered seluruhnya menunjang, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur. Program ini mendukung kelancaran tugas dan pemeliharaan Aset yang ada di kecamatan.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program ini mendukung kelancaran tugas para aparatur di kecamatan.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini mendukung kelancaran pelaporan kinerja dengan tepat waktu.
5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral. Program ini menghasilkan dokumen perencanaan kinerja (Renja)
6. Program Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Camat. Program ini mendukung kegiatan-kegiatan di kecamatan diantaranya melaksanakan rapat seksi, koordinasi, pembinaan dan fasilitasi.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Keberhasilan capaian indikator kinerja diatas tidak terlepas dari dukungan dana. Alokasi APBD Kecamatan Plered Tahun Anggaran **2023** adalah Rp.2.727.804.630,00,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp.2.657.731.016-(Dua Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Belas Rupiah) atau 97,43%. Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp.70.073.614 (Tujuh Puluh Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah)

**Tabel Anggaran dan Realisasi
Kecamatan Plered
Tahun Anggaran 2023**

No Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Thn 2023 (%)
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,512,501,006	2,293,100,938	96.34
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,319,700	1,319,700	100
0.00.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	755,900	755,900	100
0.00.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0
0.00.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0
0.00.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0	0
0.00.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0	0

0.00.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	563,800	563,800	13.33
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,363,296,800	2,154,763,316	33.33
0.00.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,360,675,500	2,152,142,016	100
0.00.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,744,700	1,744,700	100
0.00.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	876,600	876,600	100
0.00.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
0.00.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0
0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41,863,610	41,603,610	100
0.00.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,342,000	1,342,000	69.23
0.00.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13,909,410	13,909,410	20
0.00.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	0
0.00.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,829,300	5,829,300	100
0.00.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,040,000	2,040,000	100
0.00.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	15,592,900	15,332,900	100
0.00.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,100,000	2,100,000	3.64
0.00.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,050,000	1,050,000	27.08

0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
0.00.01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0
0.00.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0
0.00.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	0	0	0
0.00.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23,678,896	14,933,852	100
0.00.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20,268,896	11,523,852	100
0.00.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,410,000	3,410,000	20
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,342,000	80,480,460	100
0.00.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35,058,000	33,258,500	70
0.00.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0
0.00.01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebel	0	0	0
0.00.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27,284,000	27,221,960	100
0.00.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20,000,000	20,000,000	100

7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	158,507,400	158,096,280	100
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	43,008,800	42,953,240	100
7.01.02.2.01.01.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18,500,000	18,500,000	100
7.01.02.2.01.02.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24,508,800	24,453,240	33.33
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	23,263,200	23,207,640	100
7.01.02.2.02.02.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0	0	0
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23,263,200	23,207,640	41.67
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	92,235,400	91,935,400	100
7.01.02.2.04.01.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	0	0	0
7.01.02.2.04.02.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	0	0	0
7.01.02.2.04.03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	92,235,400	91,935,400	100
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN	37,983,300	37,927,740	100

	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	37,983,300	37,927,740	100
7.01.03.2.01.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	0	0
7.01.03.2.01.02.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0	0	0
7.01.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37,983,300	37,927,740	75
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	78,829,200	78,744,000	100
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30,000,000	30,000,000	100
7.01.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	30,000,000	30,000,000	75
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	48,829,200	48,744,000	100
7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	48,829,200	48,744,000	100

7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	0	100
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0	0	0
7.01.05.2.01.02.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	0	0
7.01.05.2.01.03.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0	0	0
7.01.05.2.01.08.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	0	0
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2,789,800	2,789,800	100
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2,789,800	2,789,800	100
7.01.06.2.01.01.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0	0	0
7.01.06.2.01.02.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0	0
7.01.06.2.01.03.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	0	0	0
7.01.06.2.01.05.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	0	0
7.01.06.2.01.06.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0
7.01.06.2.01.07.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	0	0	0
7.01.06.2.01.09.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	0	0	0

7.01.06.2.01.10.	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	0	0	0
7.01.06.2.01.14.	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	0	0	0
7.01.06.2.01.15.	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0	0	0
7.01.06.2.01.16.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2,789,800	2,789,800	10
7.01.06.2.01.17.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0	0	0
7.01.06.2.01.18.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0	0	0

Kecamatan Plered pada Tahun Anggaran 2023 menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai berikut:

1. Urusan yang Melekat pada SKPD (Non Urusan)

1) Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pelaksanaan urusan ini dalam rangka menunjang fungsi lini staf. Dalam rangka melaksanakan urusan ini, Kecamatan Plered melaksanakan 6 (Enam) Program, 7 (tujuh) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Non Urusan
Kecamatan Plered
Tahun Anggaran 2023**

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 158.507.400 dan terealisasi sebesar Rp. 158.096.280 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) sisa sebesar Rp. 411.120 (Empat Ratus Sebelas Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) atau tercapai sebesar 99,74%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut

**1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan**

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebesar Rp. 43.008.800 (Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 42.953.240 (Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) sisa sebesar Rp. 55.560 (Lima Puluh Enam Rupiah) Output : *Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan (2 Jenis)*

**a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan
kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal
Terkait**

Alokasi dana sebesar Rp. 18.500.000 (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasinya Rp. 18.500.000 (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 Sub Output : *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (2 Laporan)*

**b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan**

Alokasi dana sebesar Rp. 24.508.800 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 24.453.240 (Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 55.560 (Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) Sub Output : *Jumlah Dokumen*

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (4 Dokumen)

1.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan sebesar Rp.

23.263.200 (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 23.207.640 (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) sisa sebesar Rp. 55.560 (Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) Output : *Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah di kecamatan Plered (1 laporan)*

B.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar Rp. 37.983.300 (Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 37.927.740 (Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) sisa sebesar Rp.55.560 (Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) atau tercapai sebesar 99,85%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebesar

Rp. 37.983.300 (Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 37.927.740 (Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) sisa sebesar Rp. 55.560 (Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) Output : *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka, Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (1 Dokumen)*

:

a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Alokasi dana sebesar Rp. 24.508.800 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp.24.453.240(Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp.

55.560 (Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) Sub Output : *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (9 Laporan*

8.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Alokasi anggaran untuk Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 78.829.200 (Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 78.744.000 (Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp.85.200 (Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 99,89%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) sisa sebesar Rp. 0 *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik, Indonesia (12 laporan)*

a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

Alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000(Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan realisasinya Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) .**Sub Output :** *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di, Wilayah Kecamatan (3 laporan)*

B.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota sebesar Rp. 2.512.501.006 (Dua Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Satu Ribu Enam Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.293.100.938 (Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) sisa sebesar Rp.219.400.068 (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah)

atau tercapai sebesar 91,27%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.319.700 (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.319.700 (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 0 *Sub Output : kegiatan ini adalah Jumlah laporan perencanaan dan laporan keuangan di kecamatan yang Akuntabel Capaian Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2 dokumen)*

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Alokasi dana sebesar Rp. 563.800 (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 563.800 (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) .Sub Output : *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (2 laporan)*

b. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Alokasi dana sebesar Rp. 755.900 (Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 755.900 (Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) .Sub Output : *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2 dokumen)*

3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 2.363.296.800 (Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.154.763.316 (Dua Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah) sisa sebesar Rp. 208.533.484 (Dua Ratus Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat

Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) *Jumlah laporan pengadministrasian keuangan kecamatan (100 %)*

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Alokasi dana sebesar Rp. 2.360.675.500 (Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 2.152.142.016 (Dua Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Belas Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 208.533.484 (Dua Ratus Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) Sub Output : *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Non Kumulatif (15 orang /bulan)*

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Alokasi dana sebesar Rp. 1.744.700 (Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp.1.744.700 (Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) . Sub Output : *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1 laporan)*

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Alokasi dana sebesar Rp. 876.600 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 876.600 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) . Sub Output : *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (18 laporan)*

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 41.863.610 (Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 41.603.610 (Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) sisa sebesar Rp. 260.000 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) *Jumlah laporan pengadministrasian keuangan (3 Jenis)*

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi dana sebesar Rp.1.342.000 (Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan realisasinya Rp.1.342.000 (Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 **Sub Output** : *Jumlah Paket Komponen Instalasi, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (9 Paket)*

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi dana sebesar Rp. 13.909.410 (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah) dengan realisasinya 13.909.410 (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 **Sub Output** *sub kegiatan adalah penambahan aset peralatan kantor berupa komputer dan Laptop bertambahnya peralatan perlengkapan kantor* **Capaian Output** : *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan, Kantor yang Disediakan (2 paket)*

c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Alokasi dana sebesar Rp. 5.829.300 (Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 5.829.300 (Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp.0 . **Sub Output** : *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (7 Paket)*

d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

Alokasi dana sebesar Rp. 2.040.000 (Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasinya Rp. 2.040.000 (Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp.0 **Sub Output** : *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (2 Dokumen)*

e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material

Alokasi dana sebesar Rp. 15.592.900 (Lima Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 15.332.900 (Lima Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 260.000 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) **Sub Output** : *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (35 Paket)*

f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Alokasi dana sebesar Rp. 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan realisasinya Rp. 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 Sub Output : *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (2 laporan)*

g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Alokasi dana sebesar Rp.1.050.000 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasinya Rp.1.050.000 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp.0 Sub Output : *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD (13 laporan)*

7.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 82.342.000 (Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 80.480.460 (Delapan Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah) sisa sebesar Rp. 1.861.540 (Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, yang Dipelihara/Direhabilitasi (1 Unit)*

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Alokasi dana sebesar Rp. 35.058.000 (Tiga Puluh Lima Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasinya Rp.33.258.500 (Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 1.799.500 (Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) Sub Output : *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (7 Unit)*

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Alokasi dana sebesar Rp. 27.284.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan realisasinya Rp. 27.221.960 (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 62.040 (Enam Puluh Dua Ribu Empat Puluh Rupiah) Sub Output : *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, yang Dipelihara/Direhabilitasi (1 Unit)*

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya

Alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan realisasinya Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 **Sub Output** : *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang, Dipelihara/Direhabilitasi (1 Unit)*

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 0 (Nol) dan terealisasi sebesar Rp. 0 (Nol) sisa sebesar Rp. 0 (Nol)

a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Alokasi dana sebesar Rp. 0 (Nol) dengan realisasinya Rp. 0 (Nol) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol) **Sub Output** : *Jumlah barang milik daerah yang diadakan (4 Jenis)*

9. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 23.678.896 (Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 14.933.852 (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) sisa sebesar Rp. 8.745.044 (Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Puluh Empat Rupiah) **Output** : *Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan (2 Jenis)*

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Alokasi dana sebesar Rp. 20.268.896 (Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dengan realisasinya Rp. 11.523.852 (Sebelas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 8.745.044 (Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Puluh Empat Rupiah) **Sub Output** : *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (1 Laporan)*

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi dana sebesar Rp. 3.410.000 (Tiga Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

dengan realisasinya Rp. 3.410.000 (Tiga Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp.0 (Nol) .

Sub Output : *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (2 Laporan)*

BAB III

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SKPD: 7-1.0-0.0-0.36. KECAMATAN PLERED

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.	NON URUSAN				2.515.334.146				6.121.641.000
0.00.	NON BIDANG URUSAN				2.515.334.146				6.121.641.000
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya prosentase kebutuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah		100 Prosen	2.515.334.146			100 Prosen	6.121.641.000
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Peganggaran, Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang dihasilkan		6 Jenis	2.625.200	PIS		6 Jenis	92.141.000
0.00.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	3 Dokumen	801.600	PIS		3 Dokumen	37.141.000
0.00.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jalan Nyi Gede Cangkring (- Kecamatan plered)	1 Dokumen	482.800	PIS		1 Dokumen	15.000.000
0.00.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jalan Nyi Gede Cangkring (- Kecamatan plered)	1 Dokumen	482.800	PIS		1 Dokumen	10.000.000
0.00.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jalan Nyi Gede Cangkring (- Kecamatan plered)	1 Dokumen	-			1 Dokumen	10.000.000
0.00.01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jalan Nyi Gede Cangkring (- Kecamatan plered)	1 Dokumen	-			1 Dokumen	10.000.000

0.00.01.2.01.0006 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	15 Laporan	858.000	PIS		15 Laporan	10.000.000
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengadministrasian keuangan		3 Jenis	2.338.546.300	PIS		3 Jenis	3.518.000.000
0.00.01.2.02.0001 .	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon	15 Orang/bulan	2.336.103.000	PIS		15 Orang/bulan	3.498.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.02.0005 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	1 Laporan	1.383.700	PIS		1 Laporan	10.000.000
0.00.01.2.02.0007 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	18 Laporan	1.059.600	PIS		18 Laporan	10.000.000
0.00.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang teradministrasi dengan baik		25 Orang	-	PIS		25 Orang	30.000.000
0.00.01.2.05.0002 .	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	25 Paket	-			25 Paket	30.000.000
0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan		8 Jenis	79.161.750	PIS		8 Jenis	364.500.000
0.00.01.2.06.0001 .	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	8 Paket	2.009.800	PIS		13 Paket	50.000.000
0.00.01.2.06.0002 .	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	8 Paket	55.683.550	PIS		12 Paket	180.000.000
0.00.01.2.06.0004 .	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KABUPATEN CIREBON (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	30 Paket	-			30 Paket	35.000.000
0.00.01.2.06.0005 .	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	7 Paket	3.947.700	PIS		8 Paket	20.000.000
0.00.01.2.06.0006 .	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	2 Dokumen	2.040.000	PIS		2 Dokumen	7.000.000
0.00.01.2.06.0007 .	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	44 Paket	12.877.500	PIS		35 Paket	50.000.000
0.00.01.2.06.0008 .	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	11 Laporan	1.450.000	PIS		55 Laporan	2.500.000
0.00.01.2.06.0009 .	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	12 Laporan	1.153.200	PIS		48 Laporan	20.000.000
0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan		4 Jenis	-	PIS		4 Jenis	1.250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.07.0001 .	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jalan Nyi Gede Cangkring (- Kecamatan plered)	4 Unit	-			4 Unit	350.000.000
0.00.01.2.07.0002 .	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	3 Unit	-			3 Unit	200.000.000
0.00.01.2.07.0005 .	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	5 Unit	-			5 Unit	100.000.000
0.00.01.2.07.0010 .	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	KABUPATEN CIREBON (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	1 Unit	-			1 Unit	600.000.000
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan		2 Jenis	30.538.896	PIS		2 Jenis	75.000.000
0.00.01.2.08.0002 .	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	1 Laporan	20.268.896	PIS		2 Laporan	60.000.000
0.00.01.2.08.0003 .	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	15 Laporan	10.270.000	PIS		10 Laporan	15.000.000
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		5 Jenis	64.462.000	PIS		5 Jenis	792.000.000
0.00.01.2.09.0001 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	10 Unit	39.052.500	PIS		10 Unit	60.000.000
0.00.01.2.09.0002 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	1 Unit	-			1 Unit	7.000.000
0.00.01.2.09.0005 .	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	30 Unit	-			30 Unit	25.000.000
0.00.01.2.09.0009 .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	1 Unit	25.409.500	PIS		1 Unit	600.000.000
0.00.01.2.09.0010 .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jalan Nyi Gede Cangkring (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	1 Unit	-			1 Unit	100.000.000
7.	UNSUR KEWILAYAHAN				332.084.300				1.859.352.866

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.	KECAMATAN				332.084.300				1.859.352.866
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Prosen	165.296.200			100 Prosen	675.428.300
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan		2 Jenis	37.319.400	PIK, PIS		2 Jenis	186.060.900
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	1 Laporan	11.400.000	PIK		2 Laporan	65.000.000
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	12 Dokumen	25.919.400	PIS		12 Dokumen	121.060.900
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.		3 Kegiatan	23.838.000	PIS		3 Kegiatan	182.603.300
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	- (- Kecamatan plered)	4 Laporan	-			4 Laporan	100.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	12 Laporan	23.838.000	PIS		12 Laporan	82.603.300
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		3 Jenis	104.138.800	PIS		3 Jenis	306.764.100
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Jalan Nyi Gede Cangkring (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	12 Dokumen	-			12 Dokumen	40.000.000
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Jl. Nyi Gede Cangkring Kaliwulu Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	12 Laporan	-			12 Laporan	50.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	12 Laporan	104.138.800	PIK, PIS		12 Laporan	216.764.100
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan		100 Prosen	64.876.300			100 Prosen	257.257.900
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		3 Jenis	64.876.300	PIS		3 Jenis	257.257.900

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jalan Nyi Gede Cangkring (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	3 Lembaga Kemasyarakatan	-			3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	- (- Kecamatan plered)	4 Dokumen	-			4 Dokumen	50.000.000
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	12 Laporan	64.876.300	PIK, PIS		12 Laporan	157.257.900
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kegiatan Kordinasi untuk peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100 Prosen	98.289.200			100 Prosen	200.000.000
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah rapat koordinasi dalam penyelenggaraan trantibum		12 Laporan	50.000.000	PIS		12 Laporan	50.000.000
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	3 Laporan	50.000.000	PIS		4 Laporan	50.000.000
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		12 Laporan	48.289.200	PIS		12 Laporan	150.000.000
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jl. Nyi Gede Cangkring Plered (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	12 Laporan	48.289.200	PIS		12 Laporan	150.000.000
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat		100 Prosen	-			100 Prosen	436.666.666
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		8 Jenis	-	PIS		8 Jenis	436.666.666
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		4 Orang	-			4 Orang	250.000.000
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		4 Orang	-			4 Orang	93.333.333

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.05.2.01.0008 .	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		12 Dokumen	-			12 Dokumen	93.333.333
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa		100 Prosen	3.622.600			100 Prosen	290.000.000
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah jenis Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan		18 Jenis	3.622.600	PIS		18 Jenis	290.000.000
7.01.06.2.01.0001 .	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jalan Nyi Gede Cangkring (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	24 Dokumen	-			24 Dokumen	10.000.000
7.01.06.2.01.0002 .	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jalan Nyi Gede Cangkring (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	1 Dokumen	-			1 Dokumen	10.000.000
7.01.06.2.01.0003 .	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	- (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	12 Dokumen	-			12 Dokumen	120.000.000
7.01.06.2.01.0005 .	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jalan Nyi Gede Cangkring (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	4 Dokumen	-			4 Dokumen	10.000.000
7.01.06.2.01.0007 .	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jalan Nyi Gede Cangkring (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	4 Dokumen	-			4 Dokumen	10.000.000
7.01.06.2.01.0008 .	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jalan Nyi Gede Cangkring (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	4 Dokumen	-			4 Dokumen	10.000.000
7.01.06.2.01.0009 .	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jalan Nyi Gede Cangkring (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	12 Dokumen	-			12 Dokumen	10.000.000
7.01.06.2.01.0010 .	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jalan Nyi Gede Cangkring (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	12 Dokumen	-			12 Dokumen	10.000.000
7.01.06.2.01.0014 .	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jalan Nyi Gede Cangkring (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	12 Dokumen	-			12 Dokumen	10.000.000
7.01.06.2.01.0015 .	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jalan Nyi Gede Cangkring (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	4 Dokumen	-			4 Dokumen	10.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.06.2.01.0016 .	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jl. Nyi Gede Cangkring Kaliwulu Plered Kabupaten Cirebon (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	1 Dokumen	3.622.600	PIS		12 Dokumen	60.000.000
7.01.06.2.01.0017 .	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jalan Nyi Gede Cangkring (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	12 Laporan	-			12 Laporan	10.000.000
7.01.06.2.01.0018 .	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jalan Nyi Gede Cangkring (Desa Kaliwulu - Kecamatan plered)	4 Laporan	-			4 Laporan	10.000.000
J U M L A H					2.847.418.446				7.980.993.866

BAB IV

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja, dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang lebih baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Plered, Januari 2024


CAMAT PLERED,
DINDIN WAHYUDIN RIDWAN, S.Sos.
Pembina Tk.I
NIP. 19700207 199006 1 001

1
2

C. Tabel indikator kinerja utama

Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan Plered

NO	SASARAN / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Index Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemerintah tingkat kecamatan	CAMAT PLERED	survei indeks kepuasan masyarakat
	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).		Kuisi oner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per semester
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Prosentase Urusan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan		Data hasil pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah di kecamatan
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM).		Data Hasil pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah di kecamatan

3

NO	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	SUMBER DATA	Anggaran(Rp.)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya prosentase kebutuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah	data SOP kecamatan yang di tingkatkan	2.524.485.600,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Data Laporan hasil capaian monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan	82.585.800,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	Data Laporan Hasil Capaian Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	34.205.400,00

	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	SUMBER DATA	Anggaran(Rp.)
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kegiatan Kordinasi untuk peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Data Laopran Hasil Capaian Monitoring dan Evaluasi KegiatanKoordinasi untuk Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	4.380.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat	Data Laporan Hasil Capaian Monitoring dan Evaluasi KegiatanPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100.000.000,00
				2.745.656.800,00

Camat Plered

DINDIN WAHYUDIN RIDWAN, S.Sos.
Pembina Tk.I
NIP. 19700207 199006 1 001

14
15
16

17

18
19
20
21

Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan Plered

NO	SASARAN / OUTCAME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Index Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemerintah tingkat kecamatan	SEKERTARIS KECAMATAN	survei indeks kepuasan masyarakat
	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).		Kuisi oner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) persemester
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya prosentase kebutuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah		

NO	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	SUMBER DATA	Anggaran(Rp.)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya prosentase kebutuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah	data SOP kecamatan yang di tingkatkan	2.524.485.600,00
				2.524.485.600,00

Sekretaris Kecamatan

22
23
24
25
26
27
28

SUHEDI, S.IP.
Penata Tk.I
NIP. 19710420 200701 1 009

Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan Plered

NO	SASARAN / OUTCAME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Index Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemerintah tingkat kecamatan	KASIE PEMERINTAHAN	survei indeks kepuasan masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Prosentase Urusan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan		Data hasil pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah di kecamatan

29

NO	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	SUMBER DATA	Anggaran(Rp.)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		survei indeks kepuasan masyarakat	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan		4.557.600,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.		4.557.600,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Data hasil pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah di kecamatan	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100.000.000,00
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Rapat / Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		100.000.000,00
				104.557.600,00

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Kepala Seksi Pemerintahan,

YANDI BUDI RISWANDI, S.Sos.
Penata Tk.I
NIP. 19680728 199702 1 001

44

45

46

Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan Plered

NO	SASARAN / OUTCAME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Index Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemerintah tingkat kecamatan		survei indeks kepuasan masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Prosentase Urusan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan		Data hasil pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah di kecamatan

47

NO	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	SUMBER DATA	Anggaran(Rp.)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		survei indeks kepuasan masyarakat	74.313.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan		22.500.000,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		22.500.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		51.813.000,00

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat		51.813.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Data hasil pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah di kecamatan	14.205.400,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		14.205.400,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.		14.205.400,00
				88.518.400,00

Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial

SURMIN, S.AP.
Penata Tk.I
NIP. 19651007 198512 1 001

61
62
63
64

65

66
67

Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan Plered

NO	SASARAN / OUTCAME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Index Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemerintah tingkat kecamatan	Kasie YANLIK	survei indeks kepuasan masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Prosentase Urusan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan		Data hasil pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah di kecamatan

NO	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	SUMBER DATA	Anggaran(Rp.)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		survei indeks kepuasan masyarakat	3.715.200,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang adadi Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.	Data hasil pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah di kecamatan	3.715.200,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		3.715.200,00
				3.715.200,00

Kepala Seksi Pelayanan Publik

68
69
70
71
72
73

NUR'AENI ENTIYATI, SAP.
Penata Tk.I
NIP. 19650720 198512 2 002

Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan Plered

NO	SASARAN / OUTCAME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Index Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemerintah tingkat kecamatan	Kasubag Umum	survei indeks kepuasan masyarakat
	Meningkatnya Pelayanan Publik diKecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).		Kuisisioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) persemester

74

NO	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	SUMBER DATA	Anggaran(Rp.)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		survei indeks kepuasan masyarakat	249.207.600,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan	Kuisisioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) persemester	49.259.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan		7.054.800,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.		9.518.300,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan		5.280.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan.		8.053.200,00

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.		3.888.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan		14.564.700,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan hasil perjalanan dinas (dalam daerah)		900.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan		27.740.400,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telepon dan listrik selama 1 tahun.		20.270.400,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		7.470.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		172.208.200,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara.		41.248.800,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajak dan jasa pemeliharaannya.		3.074.500,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara.		127.884.900,00
				249.207.600,00

Kepala Subbagian Umum dan
Kepegawaian

75
76
77
78
79
80
81

82

83

84

85

86

87

88

AKHMAD BISRON
Penata
NIP. 19651219 198602 1 003